

ABSTRAK

PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP USAHA MIKRO PADA PT. BANK LAMPUNG KANTOR CABANG UTAMA BANDAR LAMPUNG

**Oleh:
Akbar Ibrahim**

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana Perbankan, dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada UMKM. PT. Bank Lampung berperan aktif dalam mendukung program pemerintah pusat yang salah satunya adalah pengembangan dan penyaluran program KUR bagi UMKM. Para pelaku Usaha Mikro dengan permasalahannya yaitu kekurangan modal usaha, dengan adanya program KUR dari pemerintah, dapat mengajukan pinjaman kredit KUR ke PT. Bank Lampung. Penelitian ini meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian, permasalahan yang timbul serta upaya mengatasi dari pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Usaha Mikro pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini bahwa syarat dalam perolehan KUR pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung debitur harus perorangan, badan usaha, dan kelompok usaha yang termasuk kategori usaha mikro, kecil, dan menengah, mempunyai kegiatan usaha dan tidak sedang menerima kredit modal kerja dan atau kredit investasi. Permasalahan hukum yang timbul adalah faktor dari kreditur dan debitur serta adanya syarat agunan tambahan. Upaya mengatasinya terjadinya kredit bermasalah adalah dengan mengusahakan solusi yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak serta ketidaktahuan adanya agunan tambahan kepada nasabah pihak penyalur melakukan sosialisasi agar para nasabah tidak merasa keberatan.

Kata Kunci : Perjanjian, Kredit Usaha Rakyat, Usaha Mikro.

ABSTRACT

PEOPLE'S BUSINESS CREDIT AGREEMENT (KUR) AGAINST MICRO BUSINESS AT PT. BANK LAMPUNG MAIN BRANCH OFFICE BANDAR LAMPUNG

**By:
Akbar Ibrahim**

The People's Business Credit Program (KUR) is one of the government's programs in increasing access to financing for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The financing disbursed by KUR comes from banking funds, the funds provided are in the form of funds for working capital needs and investments channeled to MSMEs. PT. Bank Lampung plays an active role in supporting central government programs, one of which is the development and distribution of the KUR program for MSMEs. Micro Business actors with the problem of lack of working capital, with the KUR program from the government, can apply for a KUR credit loan to PT. Lampung Bank. This study examines the implementation of the agreement, the problems that arise as well as efforts to overcome the implementation of the People's Business Credit (KUR) agreement for Micro Enterprises at PT. Bank Lampung Main Branch Office Bandar Lampung.

This type of research is an empirical normative legal research with a descriptive type of research. The data used in this study are primary data obtained through interviews from the research location and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials that will provide instructions and explanations for primary legal materials and secondary legal materials which are then analyzed. qualitative.

The results of this research and discussion are that the requirements for obtaining KUR at PT. Bank Lampung Main Branch Office Bandar Lampung debtors must be individuals, business entities, and business groups belonging to the category of micro, small and medium enterprises, have business activities and are not currently receiving working capital loans and or investment loans. Legal problems that arise are factors from creditors and debtors as well as additional collateral requirements. Efforts to overcome the occurrence of non-performing loans are to seek solutions that will be mutually beneficial to both parties and the ignorance of the existence of additional collateral to customers, the distributors, conduct socialization so that customers do not feel objections.

Keywords: Agreement, People's Business Credit, Micro Business.